



Kecil Kemungkinan Pemkot Realokasi APBD

YOGYA. TRIBUN - Pemerintah Kota (Pemkot) Yogyakarta memastikan struktur APBD 2021 telah memenuhi semua kebutuhan selama pandemi Covid-19. Sehingga, saat PPKM Darurat, eksekutif pun tak perlu bersusah payah melakukan penyesuaian anggaran.

Kesiapan APBD 2021 sudah dibuktikan dengan tidak ada catatan krusial dari Kementerian Keuangan dan Kementerian Dalam Negeri. Praktis, Kota Yogyakarta tidak masuk dalam rekomendasi untuk melakukan refocusing dan realokasi, ketika sejumlah daerah dituntut perencanaan ulang.

Wakil Wali Kota Yogyakarta, Heroe Poerwadi, mengatakan, penyesuaian dengan situasi pandemi telah dite-

kankan dalam pembahasan APBD 2021, bersama kalangan legislatif. Oleh sebab itu, pihaknya pun tinggal memfokuskan alokasi di sektor-sektor yang membutuhkan dukungan APBD.

"Sudah kami sesuaikan dengan kondisi pandemi. Artinya, APBD ini memang sejak awal diskenariokan untuk mengatasi dampak pandemi, baik menyangkut penanganan kesehatan, atau pemulihan ekonomi," katanya, Jumat (9/7).

Hanya saja, ia tidak menampik, lonjakan kasus Covid-19 yang begitu signifikan, dan berujung penerapan PPKM Darurat sesuai kebijakan pemerintah pusat, berada di luar perkiraan Pemkot Yogyakarta. Alhasil, jika benar-benar dibutuhkan, pi-

haknya pun siap melakukan realokasi anggaran.

Heroe pun menandaskan, seandainya harus dilaksanakan refocusing untuk keperluan PPKM Darurat, seluruh kegiatan masyarakat yang telah diagendakan dalam APBD 2021 tak akan terganggu. Sebab, lanjutnya, pos anggaran yang direalokasi adalah yang belum menjadi prioritas.

Namun, dengan keberadaan silpa dari APBD 2020 yang nominalnya mencapai Rp150 miliar, serta dapat dimasukkan dalam APBD 2021, kemungkinan realokasi anggaran untuk merespons PPKM Darurat sejatinya sangat kecil.

"Kemudian, misal ada realokasi, itu tidak akan drastis, ya, karena sebagian besar sudah kita siapkan. Tapi, memang ada beberapa yang

perlu realokasi, itu akan kita lakukan kalau ada kebutuhan mendesak, dalam kondisi yang tidak terduga," ujar orang nomor dua di kota pelajar itu.

Heroe, yang juga menjabat sebagai Ketua Harian Satgas Penanganan Covid-19 Kota Yogyakarta itu, menambahkan, salah satu kebutuhan yang cukup menyedot anggaran dalam PPKM Darurat adalah bantuan sosial untuk warga. Meskipun pemerintahan di tingkat pusat, serta DIY sudah mengucurkan bansos, Pemkot Yogyakarta tetap harus menyediakan alokasi sendiri. Khususnya, bagi sasaran yang tidak masuk dalam pendataan pusat, namun berstatus sebagai pemegang Kartu Menuju Sehat (KMS). (aka)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. BPKAD	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 10 Agustus 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005